

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER

Oleh:

**Moh. Riyan Hasan<sup>1</sup>**

**Putri Robiatul Adawiyah<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Jember

Alamat: JL. Karimata No. 49, Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumpersari, Kabupaten  
Jember, Jawa Timur (68124).

Korespondensi Penulis: [riyanhasann9999@gmail.com](mailto:riyanhasann9999@gmail.com).

***Abstract.** The current condition of vehicular traffic that experiences unnatural density and even exceeds the capacity of the road, is a challenge that is quite complicated for every city/region in Indonesia. The increase of two-wheeled vehicles (motorcycles) and four-wheeled vehicles (cars) every year is the main factor in this problem, while the urbanisation of people from villages to cities (overseas) is a supporting factor in the problem of congestion/density of city traffic. In response to this problem, the Jember District Transportation Office implemented road traffic engineering through the One-Way System (SSA) programme. The SSA programme was implemented on the 4 busiest roads which include; Kalimantan Road; Mastrip; Riau; and Java. Interestingly, this programme was met with strong resistance from the communities around the roads. This research will explain how the SSA programme/policy implementation process and community participation in the rejection action. Using descriptive qualitative research method and this research was conducted for 2 months. The results showed that the SSA program was indeed proven effective in unravelling road congestion during peak hours, but the implementation of SSA for 24 hours without any studies and socialisation, made this policy strongly rejected by residents and considered ineffective at all because it*

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

*disrupted the productivity of residents and students. Community participation in this one-way system program is seen in the form of energy, materials and information.*

**Keywords:** *Transportation Agency, Traffic, SSA, Rejection, Participation.*

**Abstrak.** Kondisi lalu-lintas kendaraan saat ini yang mengalami kepadatan tidak wajar dan bahkan melebihi batas kapasitas jalan, menjadi tantang yang cukup rumit bagi setiap kota/daerah di Indonesia. Bertambahnya kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) di setiap tahunnya menjadi faktor utama dalam masalah ini, sedangkan urbanisasi masyarakat dari desa ke kota (perantauan) merupakan faktor pendukung dari masalah kemacetan/kepadatan lalu-lintas kota. Menyikapi masalah tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memberlakukan rekayasa lalu-lintas jalan melalui program Sistem Satu Arah (SSA). Program SSA diberlakukan di 4 jalan tersibuk yang mencakup; Jalan Kalimantan; Mastrip; Riau; dan Jawa. Menariknya, program ini mendapatkan penolakan yang cukup keras dari masyarakat sekitar jalan tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses penyelenggaraan program/kebijakan SSA dan partisipasi masyarakat dalam aksi penolakannya. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SSA memang terbukti efektif dalam mengurai kemacetan jalan pada jam sibuk, namun pemberlakuan SSA selama 24 jam tanpa adanya kajian dan sosialisasi, membuat kebijakan ini ditolak secara keras oleh warga dan dianggap tidak efektif sama sekali karena mengganggu produktifitas warga dan mahasiswa. Partisipasi masyarakat dalam program sistem satu arah ini, terlihat dalam bentuk tenaga, material, dan informasi.

**Kata Kunci:** Dinas Perhubungan, Lalu-Lintas, SSA, Penolakan, Partisipasi.

## **LATAR BELAKANG**

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3,293,34 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 248 Desa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Jember mencapai 2,584,233 jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2023 penduduk Kabupaten Jember mengalami peningkatan sekitar 251.507 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2010 yang berjumlah 2,332,726 jiwa. Kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir mulai dari tahun 2010 jumlah kepadatan

mencapai 707 jiwa/km sampai tahun 2020 yang mencapai angka 770 jiwa/km<sup>2</sup> (Jemberkab, 2024).

Kecamatan Sumbersari yang terletak di pusat Kota Jember menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk paling banyak dengan jumlah penduduk 133,724 jiwa dengan luas wilayah 36,350 km<sup>2</sup>. Seiring dengan kepadatan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember maka meningkat juga kebutuhan sarana dan prasarana jalan raya untuk mempermudah hubungan transportasi. Pada kenyataannya jumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidakimbang dengan perkembangan sarana dan prasarana jalan raya. Terutama yang terjadi di sekitar kantor dan perguruan tinggi seperti Universitas Jember dan Politeknik Jember pada jam-jam sibuk. Masalah keluhan kemacetan yang tak kunjung selesai dan adanya beban lalu lintas terhadap ruas jalan tertentu dikarenakan volume jalan bisa saja tetap atau berkurang sementara jumlah kendaraan terus bertambah di kawasan kampus melatarbelakangi diterapkannya pemberlakuan sistem satu arah pada kawasan kampus di Jember (Jemberkab, 2024).

Lalu lintas jalan merupakan aspek integral dalam mobilitas masyarakat modern, dan pengaturan yang efisien sangat penting untuk menghindari kecelakaan dan memastikan kelancaran pergerakan kendaraan. Salah satu pendekatan yang telah banyak diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini adalah sistem satu arah jalan. Sistem ini dirancang untuk mengarahkan arus lalu lintas dalam satu arah tertentu di sepanjang sebagian atau seluruh ruas jalan. Penggunaan sistem satu arah jalan bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan hasil dari pertimbangan matang terkait dengan keamanan, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Pada dasarnya, sistem ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik di persimpangan, meningkatkan prediktabilitas, dan secara keseluruhan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih teratur. Dalam konteks pengaturan lalu lintas, sistem satu arah merujuk pada desain jalan di mana lalu lintas hanya diizinkan mengalir dalam satu arah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas dengan mengurangi potensi tabrakan dan kebingungan di persimpangan. Maka demi terciptanya arus lalu lintas di kawasan kampus yang tertib, aman, dan lancar salah satu pemecahan masalah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan adalah memberlakukan uji coba SSA (sistem satu arah) kawasan kampus selama satu bulan, terhitung mulai dari 10 Oktober 2023. Sebagai realisasi awal yang dilakukan dalam

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

menerapkan uji coba sistem satu arah adalah semua ruas jalan dibuat satu arah yang meliputi Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau yang diterapkan pada jam-jam tertentu : pagi (06.00 – 08.00) dan sore (16.00-18.00) WIB (Yakub, 2023).

Pemberlakuan sistem satu arah ini semua pengendara tidak diperbolehkan melintas di empat ruas jalan tersebut dengan arah yang berlawanan, kecuali transportasi umum yang berplat kuning atau angkutan kota masih diperbolehkan melintas pada penerapan sistem satu arah di kawasan kampus. Dengan penerapan uji coba sistem satu arah ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan volume kendaraan yang ada di ruas jalan tertentu sehingga terciptanya kelancaran dan kenyamanan bagi pengendara yang melintas di kawasan kampus. Tetapi sayangnya kebijakan yang diterapkan melalui hasil evaluasi dan kajian oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menuai penolakan dari warga yang berada di kawasan kebijakan SSA kawasan kampus. Kajian tersebut menyangkut visi rasio jalan, yakni perbandingan kapasitas jalan dengan volume lalu lintas di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrip, dan Jalan Riau. Karena lebih banyak kendaraan yang lewat daripada kapasitas lebar jalan. Warga dari sejumlah lingkungan rukun tetangga dan rukun warga di lingkungan Kelurahan Tegal Boto, Kecamatan Sumpersari menolak kebijakan ini dengan cara melakukan *hearing* atau rapat dengar pendapat antara warga lingkungan Kelurahan Tegal Boto dengan Dinas Perhubungan dan juga Komisi C DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Jember (Hari, 2023).

Warga Kelurahan Tegal Boto menolak kebijakan sistem satu arah dan ingin kembali diberlakukan sistem dua arah karena dirasa kebijakan ini merugikan. Seperti halnya menyebabkan rawan kecelakaan dikarenakan dalam sistem satu arah yang diterapkan banyak pengendara yang memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, gang lingkungan warga yang ada di kawasan sistem satu arah dijadikan alternatif oleh pengendara untuk menghindari sistem satu arah, serta merugikan secara ekonomi karena dengan adanya kebijakan ini pengendara yang melintasi sistem satu arah harus berputar yang menyebabkan konsumsi bahan bakar minyak menjadi lebih banyak. Selain melakukan penolakan dengan cara *hearing* di gedung DPRD. Penolakan terhadap kebijakan ini dapat dikatakan dilakukan secara frontal dengan menghentikan paksa sistem satu arah oleh warga yang ada di Jl. Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau (Hari, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diruaikan, peneliti menilai penelitian ini perlu dilakukan, untuk mengetahui bagaimana partisipasi publik dilibatkan dalam proses

perumusan kebijakan sistem satu arah, yang dampaknya dirasakan secara langsung bagi masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di kawasan SSA. Peneliti penilai lebih lanjut, hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap praktik praktis bagi pemerintah lokal yang menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan kemacetan lalu lintas.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3,293,34 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 248 Desa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Jember mencapai 2,584,233 jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2023 penduduk Kabupaten Jember mengalami peningkatan sekitar 251.507 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2010 yang berjumlah 2,332,726 jiwa. Kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir mulai dari tahun 2010 jumlah kepadatan mencapai 707 jiwa/km sampai tahun 2020 yang mencapai angka 770 jiwa/km<sup>2</sup> (Jemberkab, 2024).

Kecamatan Sumbersari yang terletak di pusat Kota Jember menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk paling banyak dengan jumlah penduduk 133,724 jiwa dengan luas wilayah 36,350 km<sup>2</sup>. Seiring dengan kepadatan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember maka meningkat juga kebutuhan sarana dan prasarana jalan raya untuk mempermudah hubungan transportasi. Pada kenyataannya jumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidakimbang dengan perkembangan sarana dan prasarana jalan raya. Terutama yang terjadi di sekitar kantor dan perguruan tinggi seperti Universitas Jember dan Politeknik Jember pada jam-jam sibuk. Masalah keluhan kemacetan yang tak kunjung selesai dan adanya beban lalu lintas terhadap ruas jalan tertentu dikarenakan volume jalan bisa saja tetap atau berkurang sementara jumlah kendaraan terus bertambah di kawasan kampus melatarbelakangi diterapkannya pemberlakuan sistem satu arah pada kawasan kampus di Jember (Jemberkab, 2024).

Lalu lintas jalan merupakan aspek integral dalam mobilitas masyarakat modern, dan pengaturan yang efisien sangat penting untuk menghindari kecelakaan dan memastikan kelancaran pergerakan kendaraan. Salah satu pendekatan yang telah banyak diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini adalah sistem satu arah jalan. Sistem ini dirancang untuk mengarahkan arus lalu lintas dalam satu arah tertentu di sepanjang

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

sebagian atau seluruh ruas jalan. Penggunaan sistem satu arah jalan bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan hasil dari pertimbangan matang terkait dengan keamanan, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Pada dasarnya, sistem ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik di persimpangan, meningkatkan prediktabilitas, dan secara keseluruhan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih teratur. Dalam konteks pengaturan lalu lintas, sistem satu arah merujuk pada desain jalan di mana lalu lintas hanya diizinkan mengalir dalam satu arah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas dengan mengurangi potensi tabrakan dan kebingungan di persimpangan. Maka demi terciptanya arus lalu lintas di kawasan kampus yang tertib, aman, dan lancar salah satu pemecahan masalah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan adalah memberlakukan uji coba SSA (sistem satu arah) kawasan kampus selama satu bulan, terhitung mulai dari 10 Oktober 2023. Sebagai realisasi awal yang dilakukan dalam menerapkan uji coba sistem satu arah adalah semua ruas jalan dibuat satu arah yang meliputi Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau yang diterapkan pada jam-jam tertentu : pagi (06.00 – 08.00) dan sore (16.00-18.00) WIB (Yakub, 2023).

Pemberlakuan sistem satu arah ini semua pengendara tidak diperbolehkan melintas di empat ruas jalan tersebut dengan arah yang berlawanan, kecuali transportasi umum yang berplat kuning atau angkutan kota masih diperbolehkan melintas pada penerapan sistem satu arah di kawasan kampus. Dengan penerapan uji coba sistem satu arah ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan volume kendaraan yang ada di ruas jalan tertentu sehingga terciptanya kelancaran dan kenyamanan bagi pengendara yang melintas di kawasan kampus. Tetapi sayangnya kebijakan yang diterapkan melalui hasil evaluasi dan kajian oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menuai penolakan dari warga yang berada di kawasan kebijakan SSA kawasan kampus. Kajian tersebut menyangkut visi rasio jalan, yakni perbandingan kapasitas jalan dengan volume lalu lintas di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrip, dan Jalan Riau. Karena lebih banyak kendaraan yang lewat daripada kapasitas lebar jalan. Warga dari sejumlah lingkungan rukun tetangga dan rukun warga di lingkungan Kelurahan Tegal Boto, Kecamatan Sumbersari menolak kebijakan ini dengan cara melakukan *hearing* atau rapat dengar pendapat antara warga lingkungan Kelurahan Tegal Boto dengan Dinas Perhubungan dan juga Komisi C DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Jember (Hari, 2023).

Warga Kelurahan Tegal Boto menolak kebijakan sistem satu arah dan ingin kembali diberlakukan sistem dua arah karena dirasa kebijakan ini merugikan. Seperti halnya menyebabkan rawan kecelakaan dikarenakan dalam sistem satu arah yang diterapkan banyak pengendara yang memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, gang lingkungan warga yang ada di kawasan sistem satu arah dijadikan alternatif oleh pengendara untuk menghindari sistem satu arah, serta merugikan secara ekonomi karena dengan adanya kebijakan ini pengendara yang melintasi sistem satu arah harus berputar yang menyebabkan konsumsi bahan bakar minyak menjadi lebih banyak. Selain melakukan penolakan dengan cara *hearing* di gedung DPRD. Penolakan terhadap kebijakan ini dapat dikatakan dilakukan secara frontal dengan menghentikan paksa sistem satu arah oleh warga yang ada di Jl. Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau (Hari, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menilai penelitian ini perlu dilakukan, untuk mengetahui bagaimana partisipasi publik dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan sistem satu arah, yang dampaknya dirasakan secara langsung bagi masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di kawasan SSA. Peneliti penilai lebih lanjut, hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap praktik praktis bagi pemerintah lokal yang menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan kemacetan lalu lintas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005;60) memberikan pengertian tentang kualitatif yakni penelitian untuk menjabarkan serta menganalisa baik, fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini terletak di kawasan Kota Jember, tepatnya pada 4 titik jalan yang menjadi tempat diberlakukannya sistem satu arah ini, yaitu Jl. Jawa, Jl. Kalimantan, Jl. Mastrip, dan Jl. Riau. 4 jalan ini terletak di kawasan kota yang dipadati dengan kantor pemerintahan, sekolah, universitas, dan sentra industri yang ada menyeluruh di 4 titik jalan ini, 4 titik jalan ini sama sama terletak di Kecamatan Sumpalsari. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan untuk mengumpulkan data data yang diperlukan dalam analisis penelitian, data-data yang akan diproses berupa data primer dan data sekunder. Untuk data-data primer, proses

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

pengambilannya langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan untuk data sekunder proses pengumpulan datanya diperoleh dari sumber sumber lain berupa angka maupun uraian.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistematis, ringkas dan sederhana tentang partisipasi masyarakat dalam penolakan kebijakan sistem satu arah kawasan kampus. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (Sugiyono, 2016) Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber data merupakan Pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Peneliti melakukan penggalian data dengan mewawancarai informan berbeda dengan pertanyaan yang sama. Kemudian dilihat apakah ada data yang diperoleh memiliki kesamaan antara informan satu dengan informan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pusat Kepadatan Lalu Lintas di Kawasan Kota**

Jalan Jawa di Kabupaten Jember adalah salah satu jalan utama yang sangat sibuk dan menjadi pusat aktivitas masyarakat. Jalan Jawa merupakan jalan dua arah, dengan panjang jalan adalah 1,2 km. Jalan ini dihuni oleh pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan juga dihuni oleh sekolah menengah atas dan pertama, sampai dengan Universitas Argopuro Jember dan aktivitas kos-kosan mahasiswa. Sehingga Jalan Jawa selalu macet disaat jam produktif (jam berangkat sekolah, makan siang, dan pulang sekolah).

Jalan Kalimantan di Kabupaten Jember adalah salah satu jalan utama yang sangat identik dengan kehidupan mahasiswa. Terletak di kawasan Summersari, jalan ini menjadi pusat kos-kosan, warung makan, dan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas sehari-hari mahasiswa. Jalan kalimantan merupakan jalan dua arah yang dihuni oleh aktivitas perdagangan dan Universitas Jember, sehingga ramai sekali aktivitas yang terjadi di Jalan Kalimantan. Meskipun padat dengan aktivitas, Jalan Kalimantan cukup luas dibandingkan dengan Jalan Jawa, sehingga meskipun masuk jam berangkat kerja, makan

siang, dan jam pulang kerja, Jalan Kalimantan masih tetap ramai lancar tidak dijumpai kemacetan lalu lintas.

Jalan Mastrip adalah salah satu jalan utama di Kabupaten Jember yang memiliki peran sangat penting dalam aktivitas masyarakat. Jalan ini sering disebut sebagai "Malioboronya Jember" karena selalu ramai dan menjadi pusat aktivitas berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, warga lokal, hingga wisatawan. Jalan Mastrip dihuni oleh banyak kedai-kedai angkringan yang operasinya sampai dengan 24 jam. Jalan Mastrip juga terdapat Politeknik Negeri Jember dan kos-kosan mahasiswa, sehingga jalan ini juga termasuk jalanan paling sibuk di Kabupaten Jember.

Jalan Riau di Kabupaten Jember merupakan salah satu jalan yang sangat familiar di kalangan mahasiswa, terutama mereka yang berkuliah di Universitas Jember. Jalan ini menjadi pusat kegiatan sehari-hari mahasiswa, mulai dari mencari makan, nongkrong, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jalan Riau memiliki jalur yang lebih pendek dan sempit dibandingkan dengan Jalan Jawa, Kalimantan, dan Mastrip. Meskipun lebih sempit dan pendek, Jalan Riau menjadi jalan penghubung Jalan Mastrip, Kaliurang, Tidar, Jawa, dan Karimata. Sehingga dengan demikian jalan ini tetap ramai meskipun tingkat aktivitas perdagangan dan gaya hidup tidak seramai dengan 3 jalan utama sebelumnya.

### **Mengidentifikasi Penyebab Utama Kepadatan Lalu Lintas**

Peningkatan jumlah penduduk asli dan pendatang di Kabupaten Jember. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan transportasi pribadi semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah kendaraan bermotor di jalanan juga bertambah. Kedatangan penduduk bukan asli Jember yang sedang kuliah dan kerja di Kota Jember, juga merupakan faktor yang berkontribusi besar terhadap kemacetan di kawasan kota. Keterjangkauan harga kendaraan bermotor yang semakin terjangkau, membuat masyarakat kota lebih mudah memiliki kendaraan pribadi. Pilihan-pilihan instrumen untuk mendapatkan kendaraan motor yang beragam, misalkan dalam bentuk kredit atau cicilan.

Percampuran fungsi lahan, adanya percampuran fungsi lahan antara kawasan komersial, dan industri dapat menyebabkan peningkatan aktivitas lalu lintas di satu kawasan tertentu. Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau dijumpai banyak sekali

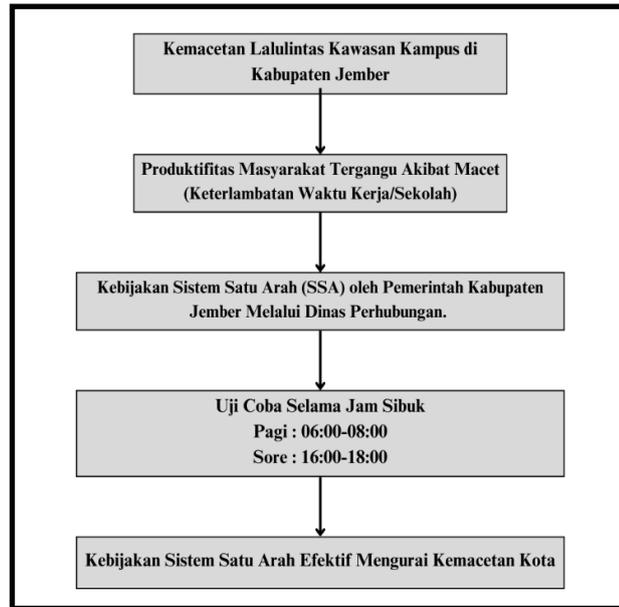
## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

aktivitas komersial yang menempati trotoar, yang merupakan ruang infrastruktur bukan fungsinya. UMKM yang memadati trotoar tentu sangat mengganggu lalu lintas kendaraan, apabila terdapat konsumen yang membeli dagangannya. Terlebih lagi pada pelaku usaha tersebut membangun lapak yang permanen di trotoar tersebut, sehingga hal ini akan menanggung arus lalu lintas sepanjang waktu. Tidak adanya sistem transportasi massal yang efektif, di Kabupaten Jember sendiri tidak memiliki sistem transportasi massal yang nyaman dan efisien membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Lin/angkot kuning dianggap kurang nyaman untuk dijadikan alternatif, karna jadwal jemput dan antar yang tidak jelas, panas, dan sempit. Seharusnya Kabupaten Jember yang semakin padat, perlu disediakan bus dalam kota dengan rute dan jadwal yang jelas.

Melawan arus dapat menyebabkan kemacetan, merupakan masalah yang menyangkut kesadaran berlalu lintas yang kurang disiplin oleh pengguna jalan. Lebih lanjut, banyak sekali kendaraan roda dua dan empat parkir di pinggir jalan yang cukup memakan banyak tempat untuk lalu lintas kendaraan. Banyak sekali pengendara yang memarkir motornya di kawasan dilarang parkir untuk membeli makanan meskipun hanya sebentar. Para tukang parkir liar justru memanfaatkan peluang ini untuk menjadikan tempat parkir berbayar di lahan-lahan kosong sekitaran jalanan sibuk.

### **Pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) Terjadwal**

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan, kerap kali menerima laporan/aduan warga terkait kemacetan yang terjadi di wilayah kota atau kampus. Aduan ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan untuk mengurai kemacetan/kepadatan lalu lintas. Upaya yang dilakukan ini kemudian disebut sebagai revitalisasi pedestrian dan wisata edukasi kampus, dengan memberlakukan sistem satu arah (SSA) di beberapa kawasan jalur melingkar.



**Gambar 1.** Pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) Terjadwal.

Gambar di atas merupakan tahapan pemberlakuan sistem satu arah (SSA) di Kabupaten Jember, yang menjelaskan;

1. Terjadinya kemacetan atau kepadatan lalu lintas di kawasan kampus, yang menyebabkan hambatan aktivitas produktif masyarakat. Kawasan yang dimaksud merupakan Jalan Jawa; Jalan Kalimantan; Jalan Mastrip; dan Jalan Riau, yang merupakan kawasan padat perkantoran, perguruan tinggi dan sekolah menengah atas dan pertama, serta aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh UMKM yang menempati pinggiran jalan atau trotoar pejalan kaki. Aktivitas dari unsur-unsur tersebut sangat berkontribusi besar terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang terjadi.
2. Para pegawai/pekerja, siswa, dan mahasiswa sering didapati keterlambatan masuk kerja, sekolah, dan kuliah akibat kepadatan/kemacetan lalu lintas tersebut. Artinya fase kemacetan atau kepadatan lalu lintas tersebut sudah masuk pada fase yang merugikan.
3. Dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memberlakukan sistem satu arah (SSA) di kawasan kota atau kampus, yang diikuti oleh seluruh jenis kendaraan. Sistem satu arah ini memaksa pengguna motor untuk memakai seluruh jalan untuk dijadikan satu arah, kemudian putar dari Jalan Kalimantan - Jalan Mastrip - Jalan Riau - Jalan Jawa. Kondisi ini memungkinkan seluruh pengguna jalan berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan.

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

4. Sistem satu arah kemudian dilaksanakan secara terjadwal pada jam-jam sibuk, yakni saat berangkat kerja dan sekolah dan saat pulang kerja (Pagi: 06:00-08:00 dan Sore: 16:00-18:00).
5. Pelaksanaan satu arah pada minggu pertama menunjukkan bahwa, rekayasa lalu lintas tersebut benar adanya dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas di kawasan kota/ kampus.

### **Pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) 24 Jam**

Kesuksesan uji coba pemberlakuan rekayasa jalan melalui sistem satu arah menjadi kabar baik bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan masyarakat yang diuntungkan dari kebijakan tersebut. Keberhasilan ini juga menjadi asal-usul kebijakan untuk memberlakukan sistem satu arah selama 24 jam untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang bertahan. Namun kebijakan justru menjadi awal masalah dan menimbulkan penolakan yang keras.

Kajian yang telah dilakukan melalui forum lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), setelah pengujian cobaan sistem satu arah, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menyebutkan bahwa akan lebih efektif sistem satu arah tersebut diterapkan selama 24 jam. Pemberlakuan sistem satu arah selama 24 jam ini merupakan tahap uji coba, yang akan selalu dievaluasi secara periodik, apakah pemberlakuan sistem satu arah selama 24 jam ini benar-benar dapat diandalkan untuk mengurangi kemacetan atau tidak.

Pemberlakuan sistem satu arah yang sebelumnya telah dianggap berhasil atau efektif mengurangi kepadatan atau kemacetan lalu lintas kota, namun tetap terdapat adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Misalnya masyarakat dan mahasiswa yang tinggal bermukim (kost dan rumah) di kawasan jalan pemberlakuan satu arah maka akan terus berputas jika ingin kembali ke tempat tinggal mereka. Kemudian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengklaim bahwa pendapatan mereka menurun sejak pemberlakuan sistem satu arah. Misalnya di awal yang mengeluhkan UMKM yang berjualan di waktu pagi dan sore, namun saat ini bertambah terhadap pelaku usaha lapak yang melaksanakan aktivitas perdagangannya di malam hari sejak pemberlakuan sistem satu arah 24 jam. Sejak dari awal, kerugian dari pemberlakuan sistem satu arah 24 jam semakin bertambah sehingga kemudian kebijakan ini didemo dan dicabut.

## **Penolakan Massa Terhadap Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA)**

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah menjelaskan sebelumnya bahwa, pemberlakuan sistem satu arah 24 jam sifatnya adalah uji coba, yang akan terus dilakukan evaluasi. Apakah pemberlakuan kebijakan sistem satu arah 24 jam akan efektif atau tidak. Melalui sub-bab ini, peneliti akan melakukan investigasi terhadap dampak pemberlakuan sistem satu arah yang dilaksanakan 24 jam. Investigasi ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder yang bersumber dari pemberitaan dan perdebatan yang terjadi di media sosial. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak di lokasi lapangan disaat pemberlakuan sistem satu arah 24 jam di kawasan kota. Termasuk dampak sistem satu arah 24 jam, yang mengalami penolakan dari masyarakat dan mahasiswa di lokasi pemberlakuan sistem satu arah. Sub-bab ini akan menyajikan banyak data-data yang melatar belakangi aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa, sampai dengan pencabutan kebijakan sistem satu arah 24 jam, dan kembalinya pemberlakuan sistem satu arah terjadwal yang hanya dilakukan pada jam-jam sibuk/produktif.

Sistem satu arah sejak diberlakukan sejak tanggal 28 Oktober 2023, sempat beroperasi secara efektif beberapa hari di minggu pertama. Seluruh pengguna jalan menaati seluruh proses sistem satu arah 24 jam tersebut. Meskipun terdapat beberapa penolakan dan keluh kesah dari masyarakat dan mahasiswa namun hal tersebut masih sebatas keluhan lisan ke lisan tanpa adanya gerakan. Penolakan terhadap sistem satu arah 24 jam di kawasan pemberlakuan sistem, pertama-tama ditandai dengan kemunculan spanduk- spanduk *banner* dengan warna dominan merah dan kuning di gang-gang pemukiman warga, yang menarasikan ketidak setujuan dan penolakan terhadap pemberlakuan sistem satu arah 24 jam. Spanduk-spanduk tersebut berawal muncul di kawasan Jalan Kalimantan, yang kemudian diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa yang bermukim di gang-gang kawasan Jalan Jawa, Jalan Mastrip, dan Jalan Riau. Spanduk yang semakin bertambah banyak tersebut, berperan sebagai petisi dari ketidakpuasan masyarakat kawasan terhadap kebijakan sistem satu arah 24 jam tersebut.

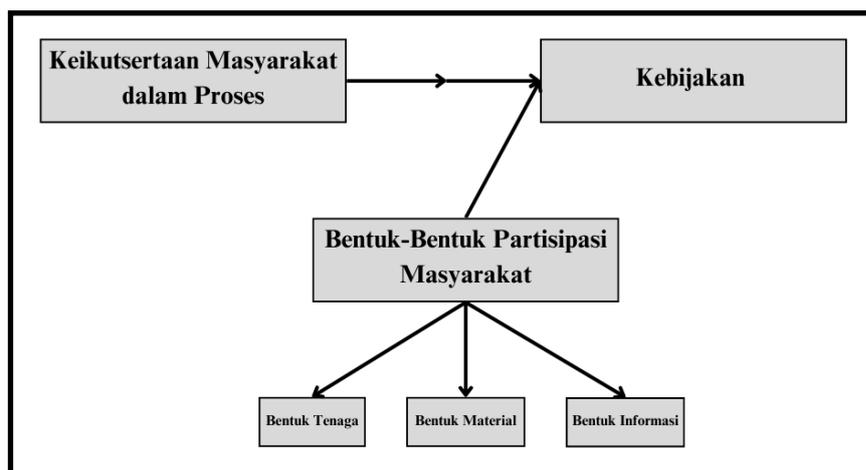
Masyarakat yang bermukim di jalan yang terkena dampak sistem satu arah 24 jam menilai bahwa; Pemberlakuan sistem ini menyusahkan warga dan mahasiswa yang hendak berpergian, atau sekedar keluar untuk membeli makan atau dengan keperluan yang lain. Masyarakat dan mahasiswa yang bermukim di kawasan tersebut diharuskan

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

memutar arah yang cukup jauh, padahal di jam-jam selain jam sibuk/produktif, yakni di jam 06:00-08:00 (pagi) dan 16:00-18:00 (sore), kondisi jalanan tidak padat dan jauh lebih senggang. Sehingga upaya memutar tersebut sangat membuang-buang bahan bakar motor dan mobil, padahal kondisi tidak sedang padat atau macet. Spanduk-spanduk petisi dari masyarakat dari 4 kawasan jalan.

Penolakan masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di kawasan jalan memberlakukan sistem satu arah yang diekspresikan melalui petisi spanduk-spanduk, merupakan babak pertama dalam proses penolakan sistem satu arah 24 jam. Memasuki babak kedua adalah aksi-aksi nyata demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, dan pekerja ojek *online* (ojol). Pekerja ojek *online* sebagai profesi yang terdampak dari kebijakan sistem satu arah 24 jam. Pekerja ojek *online* diharuskan berputar-putar untuk menjemput dan mengantarkan pelanggan ataupun makanan. Sehingga dalam proses ini, komunitas ojek *online* secara terorganisir bergabung dengan masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan penolakan dengan mencabut batasan-batasan perintah sistem satu arah 24 jam, dan menyampaikan aspirasinya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember. Hasil dari aksi penolakan ini menghasilkan pencabutan kebijakan uji coba pemberlakuan sistem satu arah selama 24 jam, dan kembalinya pemberlakuan sistem satu arah terjadwal yang dilaksanakan pada pagi dan sore.

### **Bentuk Partisipasi Masyarakat**



**Gambar 2.** Partisipasi Masyarakat.

Hasil pengumpulan data sekunder dan primer, termasuk triangulasi data dan analisis data yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;

1. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menerima keluhan warga atau pengguna lalu lintas di kawasan kota bahwa, kondisi lalu lintas saat ini menjadi padat dan macet terutama di jam-jam sibuk.
2. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tidak melakukan koordinasi secara menyeluruh kepada masyarakat lokal yang tinggal di kawasan terdampak pemberlakuan sistem satu arah.
3. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tidak melibatkan masyarakat lokal atau tokoh-tokoh masyarakat, dalam proses penyusunan sistem satu arah yang menjelaskan kesediaan masyarakat kawasan. Termasuk keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam memberlakukan sistem satu arah tersebut, merupakan kebijakan sepihak yang merugikan aktivitas produktif masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Padahal jika peneliti membandingkan alasan pemerintah kabupaten tidak melakukan penertiban atau pengusuran UMKM di jalanan, karena alasan kemanusiaan, namun hak-hak masyarakat lokal diabaikan begitu saja.
4. Masyarakat lokal asli yang tinggal di kawasan jalan terdampak sistem satu arah, menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut. Dan berharap pemerintah segera mencabut kebijakan sistem satu arah, dan segera untuk menata kota agar lebih tertib. Menggunakan jalanan untuk berjualan merupakan hal yang melanggar dan menyalahi aturan.
5. Masyarakat bersama dengan mahasiswa dilibatkan pengambilan keputusannya pasca sistem satu arah dilaksanakan dan mendapatkan penolakan yang keras, dengan melakukan tekanan dan demo di Kantor DPRD dan Pemkab Jember.

Berpedoman dengan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh (Isbandi, 2007), yang menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang mencakup; Partisipasi dalam bentuk tenaga, dana, material, informasi, pengambilan keputusan, dan representatif. Maka partisipasi masyarakat dalam penolakan kebijakan sistem satu arah di Kabupaten Jember adalah mencakup 2 bentuk yakni; pertama, dalam bentuk informasi yang tertuang dalam aduan masyarakat terkait kemacetan lalu lintas, yang kemudian dijadikan data atau acuan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan. Kedua, dalam

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

bentuk pengambilan keputusan, bentuk ini terjadi masyarakat ingin mencabut kebijakan sistem satu arah 24 jam, dan pemerintah menyetujuinya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Lemahnya partisipasi masyarakat terhadap proses kebijakan sistem satu arah di Kabupaten Jember, merupakan faktor utama dari kegagalan kebijakan ini. Melibatkan masyarakat lokal yang akan mendapatkan dampak dari kebijakan merupakan keharusan pemerintah, untuk menciptakan kesepahaman dan ketepatan dalam mengambil alternatif-alternatif kebijakan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan sistem satu arah, mendorong penolakan yang kuat dari masyarakat agar kebijakan tersebut harus segera dicabut, karena sangat mengganggu aktivitas produktif masyarakat di kawasan tersebut. Kebijakan publik yang berhasil, tentu melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya. Pemerintah kabupaten salah mengambil alternatif kebijakan, yang menunjukkan bahwa; faktor utama kemacetan jalan adalah UMKM/PKL yang menduduki trotoar dan badan jalan, namun yang terkena dampak kebijakan adalah pengguna jalan & masyarakat lokal akibat sistem satu arah.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jember terkait sistem satu arah sebagai berikut;

1. Sistem satu arah hendaknya menjadi kebijakan jangka pendek, yang harus segera dicabut agar tidak mengganggu aktivitas produktivitas masyarakat lokal di kawasan jalan terdampak sistem satu arah.
2. Pemerintah harus serius dalam percepatan relokasi UMKM atau pedagang kaki lima yang menempati trotoar atau bahkan badan-badan jalan. Pertama karena hal tersebut sudah menyalahi aturan dan ilegal. Kedua, hal tersebut adalah faktor utama kemacetan di jalan kawasan kampus.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adawiyah, P. R. (2018). Inovasi dalam Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. *POLITICO*, 18(2).
- Amellia, P., Muhafidin, D., & Darto, D. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM SATU ARAH PADA KAWASAN SUKAJADI DALAM MENGURAI*

- KEMACETAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG. *JANE- Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 497-503.
- Andreeyan, R. (2014). Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan sambutan kecamatan sambutan kota samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(4), 1938-1951.
- Angin, R., & Adawiyah, P. R. (2023). Population and Civil Registration Public Services Digital Transformation During the Covid-19 Pandemic. *Journal of Government and Civil Society*, 7(1), 140-158.
- Angin, R., Setyaningtyas, R., & Adawiyah, P. R. (2022, December). Using the IPCC Formula to Calculate CO2 Emissions from Everyday Motorized Vehicles as the Baseline for Climate Change Mitigation Policies. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1105, No. 1, p. 012049). IOP Publishing.
- Laksono Ambang Hari. 2023. Ribuan Driver Ojol Demo, Menolak Keras Sistem Satu Arah di Jember. <https://suaraIndonesia.co.id/news/peristiwa/654099c1b2e45/Ribuan-Driver-Ojol-Demo-Menolak-Keras-Sistem-Satu-Arah-di-Jember>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.
- Lintas, A. P. M. R. L. REKAYASA LALU LINTAS. KESELAMATAN LALU LINTAS, 18.
- Mulyono Yakub. 2023. Dishub Jember Terapkan Sistem Satu Arah di Ruas Jalan Lingkar Kampus Unej. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7011047/dis-hub-jember-terapkan-sistem-satu-arah-di-ruas-jalan-lingkar-kampus-unej>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.
- MUTAQIN, A. A. (2024). MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DENGAN PEMODELAN MIKROSIMULASI DI SIMPANG MARTOLOYO KOTA TEGAL (Doctoral dissertation, POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN).
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2024. Selayang Pandang. <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.
- Radjawane, L. E. (2023). Evaluasi Metode Pembelajaran Project Based Learning pada Mata Kuliah Rekayasa Lalu Lintas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.2), 1823-1829.

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER**

- Romadhona, P. J. (2020). Perbandingan Kinerja Ruas Jalan Sebelum Penerapan Sistem Satu Arah pada Tahun 2013 dan Sesudah Penerapan Sistem Satu Arah pada Tahun 2019 di Jalan Selokan Mataram-Babarsari.
- SALSABILA, S. A. (2024). KAJIAN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN STASIUN KOTA PASURUAN (Doctoral dissertation, POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN).
- Seftiyana, Y., & Angin, R. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.
- Sholehah, I. N., & Angin, R. (2018). Implementasi Program Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Aparatur Pemerintah Daerah Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Jember. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sudrajat, A. R., Pranawati, N. W., & Sawitri, N. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 5(1), 106-116.
- Suji, S. (2024). Analisis Implementasi Sistem Satu Arah Jalur Kampus Universitas Jember. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 445-453.
- Syahrul, J. S. D. (2020). Efektivitas Program Sistem Satu Arah Pengaturan Jalan di Kota Depok Periode 2017-2019 (Studi Jalan Nusantara Raya) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NASIONAL).
- Wa'Bone, G., Rumayar, A. L., & Pandey, S. V. (2023). Analisis Pemanfaatan Manajemen Lalu Lintas Sistem Dua Arah Dan Satu Arah Terhadap Efektifitas Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus: Jalan Bethesda, Kec. Sario, Kota Manado). *TEKNO*, 21(83), 147-156.
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 1-14.
- Wafa, A., Angin, R., & El Muhammady, I. G. (2024). Digital Branding and Revitalization, as an Effort to Improve the Image and Income of MSMEs in Blimbingsari Village, Banyuwangi Regency. *REKA ELKOMIKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 178-191.

- Wafa, A., Siswanto, E., Angin, R., & Adawiyah, P. R. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Panduman Tahun 2020-2025. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(4), 427-439.
- Wijayanto, D. F., Susilo, B. H., Yuwono, B. E., Muhammad, D., & Maha, I. (2024). ANALISIS MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS WILAYAH KOTA SERANG BARU. *Journal of Syntax Literate*, 9(4).